

Analisis Sentimen Publik Terhadap Implementasi Program Pendidikan Karakter Berbasis Barak Militer Di Jawa Barat

Diki Suherman^{1*}, Ami Afriyani², Nanang Suparman², Taufiq Rahmat³

¹Ilmu Administrasi Negara, Universitas Al Ghifari, Bandung, Indonesia

²Administrasi Publik, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

³Manajemen, Universitas Al Ghifari, Bandung, Indonesia

Corresponding Author Email: dikisuherman@unfari.ac.id@gmail.com

Diterima: 15 Juni, 2026, Direvisi: 30 juni, 2026, Disetujui: 13 juli, 2026

ABSTRACT

The increasing cases of juvenile delinquency, student brawls, and behavioral problems in West Java led to the introduction of the Military Barracks Education policy as a measure to strengthen student discipline and character. The policy has triggered significant public debate, especially on social media, making it important to understand how the public responds. This study aims to analyze public sentiment toward the policy through Instagram user comments. Data were collected using a web-crawling technique with Instant Data Scraper, resulting in 8,169 comments from various related posts. All data underwent text preprocessing and were analyzed using the IndoBERT model to classify sentiments into positive, negative, and neutral categories. The findings indicate that negative sentiment dominates with 3,639 comments, followed by 3,320 positive and 1,210 neutral comments. Negative sentiment primarily reflects concerns about psychological risks, potential stigma, and the lack of transparency in participant selection, while positive sentiment highlights support for improving student discipline. These results show that the Military Barracks Education policy remains controversial and requires further evaluation to align with humanistic education principles and child protection standards.

Keywords: *Sentiment Analysis, Social Media, Military Barracks, Public Policy.*

ABSTRAK

Merespon berbagai Tindakan menyimpang di dunia pendidikan pemerintah Jawa Barat mengeluarkan program Pendidikan karakter berbasis barak militer. Kebijakan ini kemudian memicu perdebatan publik, terutama di media sosial, sehingga penting untuk mengetahui bagaimana masyarakat meresponsnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis sentimen publik terhadap kebijakan tersebut melalui komentar pengguna Instagram. Data diperoleh menggunakan teknik web crawling dengan Instant Data Scraper dan menghasilkan 8.169 komentar dari berbagai unggahan terkait. Seluruh data diproses melalui tahapan pra-pemrosesan teks dan dianalisis menggunakan model IndoBERT untuk mengklasifikasikan sentimen menjadi kategori positif, negatif, dan netral. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sentimen negatif mendominasi dengan 3.639 komentar, diikuti sentimen positif sebanyak 3.320 komentar, dan netral sebanyak 1.210 komentar. Sentimen negatif didominasi kekhawatiran mengenai dampak psikologis, potensi stigma, serta kurangnya transparansi seleksi peserta, sedangkan sentimen positif berkaitan dengan dukungan terhadap peningkatan disiplin siswa. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan Pendidikan Barak Militer masih menimbulkan resistensi publik dan memerlukan evaluasi lanjut agar selaras dengan prinsip pendidikan yang humanis dan perlindungan anak.

Kata kunci: Analisis Sentimen, Media Sosial, Pendidikan Karakter, Kebijakan Publik.

PENDAHULUAN

Pendidikan karakter telah menjadi fokus utama pemerintah dalam membentuk generasi muda yang berintegritas, disiplin, dan berjiwa nasionalis (Yunizar & Karina, 2024). Di Provinsi Jawa Barat, kebijakan ini muncul sebagai respons terhadap meningkatnya kekhawatiran masyarakat atas perilaku menyimpang di kalangan pelajar, seperti pergaulan bebas, tawuran, dan kenakalan remaja (Prayoga, 2025; Widjaja & Prastiwi, 2025). Dalam upaya memperkuat nilai moral serta kedisiplinan peserta didik, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerbitkan Surat Edaran Gubernur No. 45/PK.03.03/KESRA Tahun 2025 tentang 9 Langkah Pembangunan Pendidikan Jawa Barat Menuju Terwujudnya Gapura Panca Waluya, yang salah satu poinnya khususnya poin ke-8 menjadi perhatian publik karena memuat program Pendidikan Barak Militer. Program ini merupakan pembinaan khusus berbasis kedisiplinan militer bagi siswa yang terlibat perilaku negatif seperti tawuran, kecanduan game online, merokok, atau tindakan indisipliner lainnya (Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2025).

Pelaksanaan awal program menunjukkan bahwa implementasi sudah berjalan di beberapa daerah. Di Kota Bandung, tercatat sebanyak 30 siswa mengikuti pendidikan disiplin di Rindam III/Siliwangi pada 2 Mei 2025, sementara di Purwakarta pada hari sebelumnya telah dimulai pembinaan terhadap 39 siswa (Syafei & Assifa, 2025). Pemerintah menjelaskan bahwa pembinaan berlangsung selama enam bulan per siswa, dengan penentuan peserta berdasarkan kesepakatan sekolah dan orang tua, khususnya bagi siswa dengan riwayat perilaku indisipliner, pergaulan bebas, atau potensi terlibat tindak kriminal. Program ini juga ditekankan sebagai upaya pembentukan karakter, etika, dan kedisiplinan sebagai langkah preventif terhadap perilaku remaja berisiko (Panuntun & Krisiandi., 2025; Prayoga, 2025).

Namun demikian, kebijakan ini memunculkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Di satu sisi, pendukung kebijakan menilai bahwa barak militer menjadi langkah konkret dalam menanamkan disiplin, nasionalisme, dan tanggung jawab, terutama bagi generasi muda yang

dianggap rentan terhadap pengaruh negatif (Widjaja & Prastiwi, 2025). Di sisi lain, lembaga pengawas hak anak seperti KPAI mengkritik bahwa program ini berpotensi menimbulkan pelanggaran prinsip pemenuhan hak anak, terutama terkait transparansi seleksi peserta, risiko stigmatisasi sebagai anak bermasalah, serta temuan bahwa sejumlah siswa tidak mengetahui alasan mereka mengikuti program (A. P. Dewi, 2025). Kritik ini menegaskan bahwa pelaksanaan kebijakan perlu evaluasi ketat, terutama dalam aspek psikologis dan perlindungan anak.

Pendidikan karakter berbasis barak militer merupakan salah satu inovasi kebijakan yang diluncurkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai respons terhadap persoalan degradasi moral dan kedisiplinan di kalangan pelajar (Parhi, 2025). Sebagai sebuah kebijakan publik, keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh desain dan tujuan normatifnya, tetapi juga oleh sejauh mana masyarakat menerima dan mendukung implementasinya. Penerimaan publik terhadap suatu kebijakan, atau yang dikenal dengan konsep *policy acceptance* (Rahmat & Cangara, 2024), menjadi faktor krusial karena kebijakan yang tidak memperoleh dukungan masyarakat berisiko mengalami resistensi, keterlambatan pelaksanaan, hingga kegagalan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Konsep *policy acceptance* menjelaskan bahwa penerimaan masyarakat terhadap suatu kebijakan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kesesuaian kebijakan dengan nilai dan kepercayaan masyarakat, tingkat kepercayaan terhadap pemerintah, serta kesadaran masyarakat terhadap urgensi permasalahan yang ingin diselesaikan oleh kebijakan tersebut (Prasetyo dkk., 2024; Rahmat & Cangara, 2024).

Beragam opini tentang Pendidikan karakter berbasis barak militer yang dinilai penting untuk menanamkan kedisiplinan, tanggung jawab, dan mental tangguh pada siswa bermasalah melalui rutinitas terstruktur serta menjauhkan mereka sementara dari lingkungan negatif seperti tawuran atau pergaulan buruk (Rosnawati & Satyadharma, 2025). Media sosial, khususnya Instagram, menjadi salah satu ruang publik digital di mana masyarakat secara terbuka menyampaikan opini, kritik, maupun dukungan

terhadap kebijakan ini. Komentar, unggahan, dan interaksi pengguna di platform tersebut dapat menjadi representasi sentimen publik secara *real-time*, sehingga analisis sentimen menjadi instrumen yang relevan untuk mengukur tingkat penerimaan masyarakat terhadap kebijakan pendidikan karakter berbasis barak militer. Dalam era digital saat ini, media sosial menjadi wadah utama masyarakat untuk mengekspresikan opini dan membentuk persepsi terhadap suatu kebijakan (Fazrina dkk., 2025). Instagram, sebagai salah satu platform yang banyak digunakan generasi muda, sering kali menjadi ruang diskusi publik yang dinamis, di mana komentar dan unggahan dapat mencerminkan sentimen masyarakat secara langsung dan spontan (Kartodinoto dkk., 2024). Oleh karena itu, analisis terhadap konten di media sosial, khususnya Instagram, menjadi penting untuk memahami bagaimana kebijakan publik diterima dan dinilai oleh masyarakat luas (Putra, 2024).

Dalam teori kebijakan publik yang dikemukakan oleh Dunn (2017), kebijakan pemerintah merupakan serangkaian keputusan yang diambil untuk menyelesaikan masalah publik melalui proses formulasi, implementasi, dan evaluasi. Artinya, efektivitas kebijakan pendidikan barak militer tidak hanya dilihat dari keberhasilannya membentuk karakter, tetapi juga dari bagaimana kebijakan tersebut diterima oleh masyarakat. Penerimaan publik inilah yang berkaitan erat dengan teori opini publik yang dijelaskan oleh McCombs (2014), di mana opini masyarakat terbentuk melalui proses sosial yang membuat individu cenderung mengikuti pandangan mayoritas agar tidak terisolasi secara sosial.

Selain itu, penelitian ini juga berlandaskan pada teori analisis sentimen menurut Liu (2012), yang menyatakan bahwa analisis sentimen merupakan proses mengidentifikasi dan mengklasifikasikan opini publik menjadi sentimen positif, negatif, atau netral berdasarkan teks yang diunggah di platform digital. Melalui pendekatan ini, persepsi masyarakat terhadap kebijakan publik dapat diukur secara objektif berdasarkan data nyata dari media sosial. Selanjutnya, teori komunikasi digital dari Castells (2011) memperkuat pandangan bahwa media sosial telah menjadi ruang

publik baru yang bersifat partisipatif, di mana masyarakat berperan aktif dalam menilai, mengkritik, dan membentuk opini terhadap kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, teori-teori ini menjadi dasar konseptual penelitian dalam menganalisis bagaimana kebijakan pendidikan barak militer dipersepsikan oleh publik melalui media sosial Instagram.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas kebijakan pendidikan barak militer di Jawa Barat dari berbagai perspektif. Penelitian Anwari dkk., (2025) dalam artikel “Efektivitas Program Barak Militer Solusi Untuk Mengatasi Siswa/Remaja Bermasalah Di Provinsi Jawa Barat” menemukan bahwa kebijakan ini efektif dalam membentuk kedisiplinan dan tanggung jawab sosial siswa, meskipun dibutuhkan pendampingan psikolog agar tidak menimbulkan tekanan emosional. Selanjutnya, Penelitian Parhi (2025) dalam penelitian “Analisis Gagasan Kang Dedi Mulyadi tentang Pendidikan Karakter Remaja melalui Model Barak Militer” menunjukkan bahwa program barak militer mampu meningkatkan kesadaran moral dan empati sosial remaja jika dilaksanakan dengan pendekatan pembinaan yang humanis. Sementara itu, penelitian Setyawan dkk., (2025) dalam artikelnya berjudul “Kontestasi Framing Media Online Indonesia Model Robert M. Entman terhadap Program Barak Militer Dedi Mulyadi” menunjukkan bahwa media daring memiliki peran penting dalam membentuk persepsi publik terhadap Program Barak Militer. Melalui analisis framing, penelitian tersebut menemukan bahwa sebagian besar media membingkai program ini secara positif dengan menonjolkan aspek kedisiplinan dan pembinaan karakter, sementara kritik mengenai potensi pelanggaran hak anak dan dampak psikologis hanya muncul sebagai narasi marginal.

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa kajian terdahulu lebih menyoroti efektivitas dan dampak moral dari kebijakan barak militer, sedangkan analisis sentimen publik terhadap kebijakan tersebut di media sosial, khususnya Instagram, belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menelaah kecenderungan sentimen masyarakat (positif, negatif,

dan netral) serta isu-isu yang paling sering diperbincangkan dalam tanggapan publik di Instagram.

Penelitian ini berfokus pada bagaimana sentimen publik terbentuk terhadap kebijakan pendidikan barak militer di Jawa Barat melalui tanggapan pengguna Instagram. Penelitian ini akan mengidentifikasi arah sentimen publik (positif, negatif, dan netral) serta isu-isu yang paling sering diperbincangkan masyarakat terkait kebijakan tersebut. Selain menganalisis kecenderungan arah sentimen publik, penelitian ini juga menyoroti isu-isu yang berkaitan dengan implementasi kebijakan Pendidikan Barak Militer sebagaimana muncul dalam diskursus publik di Instagram dan sumber sekunder.

Peninjauan ini tidak dilakukan melalui observasi lapangan, melainkan melalui interpretasi komentar publik serta referensi resmi untuk memahami persepsi masyarakat terhadap mekanisme pelaksanaan, koordinasi antarinstansi, dan dinamika kebijakan yang berkembang. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memetakan persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah, tetapi juga untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika opini publik di era digital serta kondisi realistis kebijakan barak militer yang tengah berjalan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya menganalisis sentimen publik di Instagram sebagai indikator *policy acceptance* terhadap implementasi program pendidikan karakter berbasis barak militer di Jawa Barat, guna memberikan gambaran mengenai sejauh mana kebijakan ini diterima oleh masyarakat serta faktor-faktor yang melatarbelakanginya.

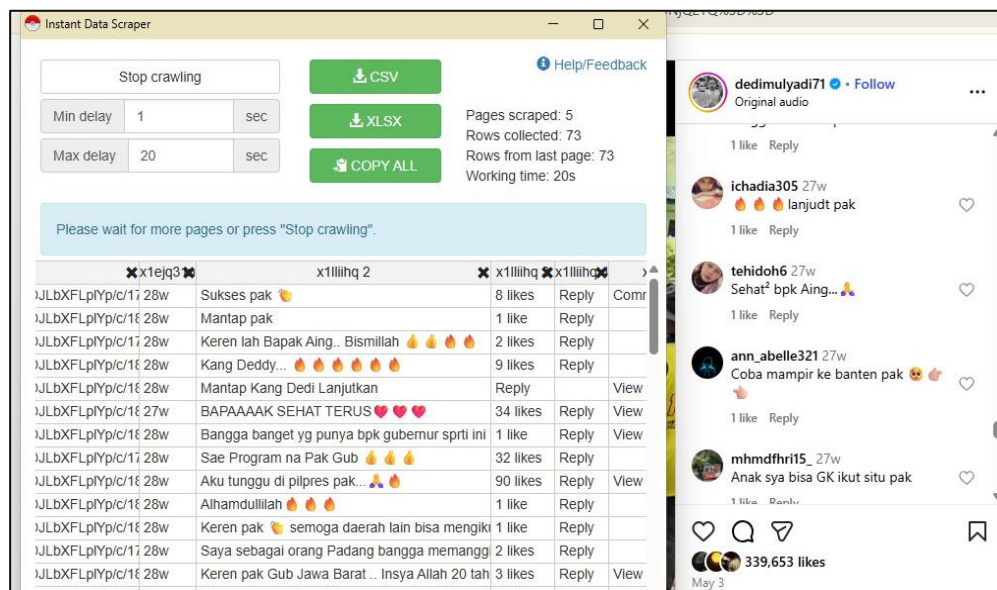
METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan mix metod, pendekatan penelitian yang menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif dalam satu studi, dengan asumsi bahwa penggabungan keduanya memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang masalah penelitian dibanding menggunakan satu pendekatan saja (Creswell W, 2018). Pada pendekatan kuantitatif melalui metode analisis sentimen berbasis

Natural Language Processing (NLP) (Liu, 2012). Pendekatan ini dipilih karena data komentar publik yang terkumpul dapat diubah menjadi bentuk numerik sehingga kecenderungan opini dapat dianalisis secara objektif dan terukur. Selain pendekatan kualitatif, artikel ini juga menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menginterpretasikan hasil analisis kuantitatif secara deskriptif. Pendekatan ini mengkonstruksi konsep penerimaan kebijakan dengan konteks sosial yang ada di lapangan. Berikut Langkah penyajian data kuantitatif sebagai berikut :

1. Sumber dan Pengumpulan Data (dedimulyadi71, metrotv, narasineewsroom, hukumonlinenewsroom, senayanid, inilah_com)

Data penelitian berasal dari komentar pengguna Instagram pada unggahan yang membahas kebijakan Pendidikan Barak Militer di Jawa Barat. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik web crawling menggunakan ekstensi Instant Data Scraper karena API Instagram tidak menyediakan akses langsung ke komentar publik. Melalui proses crawling, terkumpul 8.169 komentar dari unggahan media massa dan akun pemerintah daerah yang menyoroti implementasi kebijakan tersebut.



Gambar 1. Proses crawling komentar Instagram menggunakan ekstensi Instant Data Scraper.

Seluruh data disimpan dalam format Excel (.xlsx) dan diunggah ke Google Colab untuk dianalisis lebih lanjut. Komentar yang bersifat spam, promosi, tidak relevan, atau tidak mengandung teks kemudian diseleksi dan dihapus sehingga hanya komentar yang secara langsung menyinggung kebijakan yang dipertahankan sebagai dataset akhir.

2. Pra-pemrosesan Teks (Text Pre-processing). Komentar yang diperoleh kemudian dibersihkan agar layak dianalisis oleh model NLP. Tahapan pra-pemrosesan dilakukan menggunakan Python di Google Colab, mencakup:

a) Cleaning (Pembersihan emoji, URL, mention, simbol, dan karakter nonteks) Pada tahap cleaning dilakukan penghapusan elemen nonteks seperti emoji, simbol, URL, mention, angka, tanda baca berlebih, serta whitespace. Tujuan dari tahap ini adalah mengurangi noise pada data sehingga model dapat membaca struktur kalimat dengan lebih akurat.

Tabel 1 Hasil Tahap Cleanig

Sebelum	Sesudah
Pendidikan ini konyol!!! Cek link https://bit.ly/..... @pemprovjabar”	“pendidikan ini konyol cek link pemprovjabar”
“Mantapp!! Harus begini biar anak2 gak nakal	“mantapp harus begini biar anak2 gak nakal”

b) Case folding (mengubah seluruh huruf menjadi huruf kecil). Tahap ini mengubah seluruh huruf menjadi huruf kecil (lowercase) agar data seragam karena model NLP membedakan huruf besar dan kecil.

Tabel 2 Hasil Tahap Case Folding

Sebelum	Sesudah
“Mantapp Harus Begini Biar Anak- anak Gak Nakal”	“mantapp harus begini biar anak- anak gak nakal”

- c) Normalisasi kata tidak baku dan bahasa gaul. Komentar pada Instagram banyak menggunakan singkatan, bahasa daerah, kata tidak baku, dan bahasa gaul. Tahap normalisasi mengubahnya menjadi bentuk baku agar mudah dipahami model.

Tabel 3 Hasil Tahap Normalisasi

Sebelum	Sesudah
“gw setuju bgt sih, biar bocil ga makin liar”	“saya setuju banget biar anak kecil tidak semakin liar”
“kok kyk gini sih? serem bgt sumpah”	“mengapa seperti ini sangat menyeramkan sekali”

- d) Tokenisasi (memecah teks menjadi unit kata). Tokenisasi adalah proses memecah kalimat menjadi unit kata sehingga mempermudah model dalam membaca struktur kalimat.

Tabel 4 Hasil Tahap Tokenisasi

Sebelum	Sesudah
“program ini terlalu keras buat anak sekolah”	[“program”, “ini”, “terlalu”, “keras”, “buat”, “anak”, “sekolah”]

- e) Penghapusan stopwords. Stopword berupa kata yang tidak memiliki makna penting (misal: yang, dan, atau). Penghapusan dilakukan agar hanya kata signifikan yang diproses model.

Tabel 5 Tahap Tahap Stopword Removal

Sebelum	Sesudah
["program", "ini", "terlalu", "keras", "buat", "anak", "sekolah"]	["program", "keras", "anak", "sekolah"]

Tahapan pra-pemrosesan ini dilakukan agar komentar yang diperoleh memiliki struktur yang seragam serta bebas dari gangguan teks nonrelevan. Dengan demikian, akurasi model dalam proses analisis sentimen dapat meningkat dan hasil klasifikasi menjadi lebih valid serta representatif.

	teks_mentah	teks_bersih	tokenized_output	sentimen	sentimen_label	
0	Sukses pak 🙏	sukses pak 🙏	[input_ids, token_type_ids, attention_mask]	{'label': 'positive', 'score': 0.9993253946304...}	positive	0.999325
1	Mantap pak	mantap pak	[input_ids, token_type_ids, attention_mask]	{'label': 'positive', 'score': 0.9993686079978...}	positive	0.999369
2	Keren lah Bapak Aing.. Bismillah 🙏🙏🙏	keren lah bapak aing.. bismillah 🙏🙏🙏	[input_ids, token_type_ids, attention_mask]	{'label': 'positive', 'score': 0.9992678761482...}	positive	0.999268
3	Mantap Kang Dedi Lanjutkan	mantap kang dedi lanjutkan	[input_ids, token_type_ids, attention_mask]	{'label': 'positive', 'score': 0.9974721074104...}	positive	0.997472
4	Alhamdulillah 🙏🙏🙏	alhamdulillah 🙏🙏🙏	[input_ids, token_type_ids, attention_mask]	{'label': 'positive', 'score': 0.9991269707679...}	positive	0.999127
...	...	...	...	...	...	...
8166	Plot nyaa guru nya juga lqyak di masukin barak...	plot nyaa guru nya juga lqyak di masukin barak...	[input_ids, token_type_ids, attention_mask]	{'label': 'negative', 'score': 0.9984656572341...}	negative	0.998466
8167	Guru BK kurang kuat, kalo ortu ga Terima bisa ...	guru bk kurang kuat, kalo ortu tidak terima bi...	[input_ids, token_type_ids, attention_mask]	{'label': 'negative', 'score': 0.9917085766792...}	negative	0.991709
8168	Guru BK belum bisa maksimal karena semua sekol...	guru bk belum bisa maksimal karena semua sekol...	[input_ids, token_type_ids, attention_mask]	{'label': 'negative', 'score': 0.5237624645233...}	negative	0.523762
8169	Guru beka gak ngaruh buat anak nakal, saya san...	guru beka gak ngaruh buat anak nakal, saya san...	[input_ids, token_type_ids, attention_mask]	{'label': 'negative', 'score': 0.9968425970077...}	negative	0.996843
8170	Ya tandanya pihak guru sama ortu murid dah ang...	ya tandanya pihak guru sama ortu murid dah ang...	[input_ids, token_type_ids, attention_mask]	{'label': 'negative', 'score': 0.9991188645362...}	negative	0.999119

Gambar 3. Tampilan data komentar yang telah melalui proses pra-pemrosesan.

3. Analisis Sentimen Berbasis NLP

Analisis sentimen dilakukan menggunakan model bahasa berbasis Transformer, yaitu IndoBERT, yang dirancang untuk memahami struktur dan konteks Bahasa Indonesia. Model ini mengklasifikasikan komentar ke dalam tiga kategori: positif, negatif, dan netral, serta memberikan skor keyakinan pada setiap prediksi.

Model dipilih karena mampu membaca ragam bahasa informal pengguna Instagram, termasuk variasi slang, struktur kalimat tidak baku, dan konteks komentar pendek.

Sentiment_label		count
0	negative	3639
1	positive	3320
2	neutral	1210

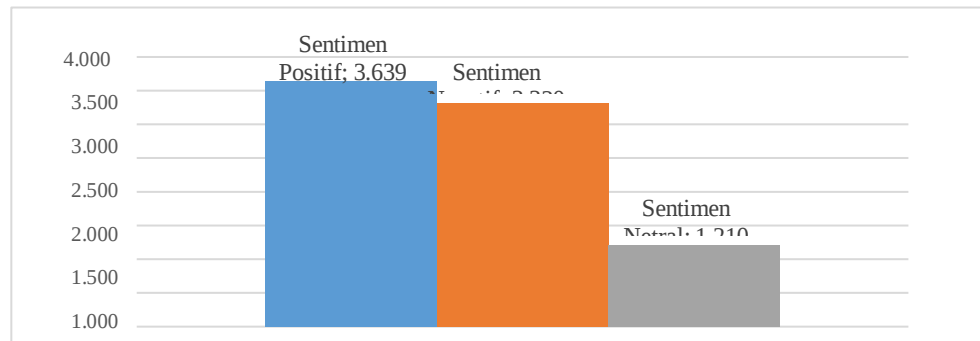
Gambar 4. Hasil klasifikasi senti men menggunakan model IndoBERT di Google Colab.

4. Analisis dan Penyajian Hasil

Data yang telah terklasifikasi dianalisis secara deskriptif untuk melihat pola dominan opini publik. Hasil sentimen kemudian divisualisasikan dalam bentuk grafik distribusi sentimen, word cloud, serta tabel rekapitulasi untuk menunjukkan kecenderungan opini dan kata yang paling sering muncul dalam diskursus publik tentang kebijakan Pendidikan Barak Militer. Visualisasi ini memudahkan interpretasi tren dan isu utama yang berkembang di masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Hasil Klasifikasi Sentimen



Gambar 5. Grafik distribusi sentimen komentar terhadap kebijakan Pendidikan Barak Militer

Hasil klasifikasi sentimen terhadap 8.169 komentar yang diperoleh dari Instagram menunjukkan bahwa respons publik terhadap kebijakan Pendidikan Barak Militer di Jawa Barat tidak bersifat seragam, melainkan terpolarisasi dengan kecenderungan kuat pada sentimen negatif. Model IndoBERT mengelompokkan komentar ke dalam tiga kategori, yaitu negatif (3.639 komentar), positif (3.320 komentar), dan netral (1.210 komentar). Distribusi ini menggambarkan adanya dinamika opini publik yang kompleks, di mana masyarakat tidak hanya memberikan dukungan atau penolakan secara langsung, tetapi juga menunjukkan sikap hati-hati dan informatif terkait kebijakan tersebut.

Secara persentase, sentimen negatif mendominasi dengan 44,6%, menandakan bahwa hampir setengah dari keseluruhan komentar mencerminkan ketidaksetujuan atau kekhawatiran terhadap kebijakan barak militer. Banyak komentar negatif berfokus pada isu psikologis dan pedagogis, seperti potensi tekanan mental bagi siswa, risiko praktik kedisiplinan yang terlalu keras, serta ketidakselarasan antara pendekatan militeristik dengan prinsip pendidikan yang ramah anak. Pengguna juga mengkritik kemungkinan adanya kekerasan simbolik yang mungkin tidak disengaja, namun berpengaruh terhadap mental siswa. Selain itu, beberapa komentar menyoroti kurangnya pelibatan publik dalam perumusan kebijakan, sehingga menimbulkan kesan top-down yang memicu resistensi masyarakat. Dominasi sentimen negatif ini menggambarkan bahwa

kekhawatiran masyarakat tidak hanya terkait aspek teknis pelaksanaan, tetapi juga menyangkut nilai fundamental dalam pendidikan modern.

Di sisi lain, sentimen positif mencapai 40,6% atau 3.320 komentar, sebuah angka yang cukup besar dan menunjukkan bahwa tidak sedikit masyarakat yang melihat kebijakan ini sebagai langkah solutif. Komentar positif banyak menekankan perlunya pembinaan disiplin bagi siswa yang terlibat perilaku negatif seperti tawuran, perundungan, geng motor, kecanduan gawai, dan menurunnya moralitas remaja. Bagi kelompok ini, pendekatan barak militer dipandang sebagai metode yang tegas dan langsung untuk memperbaiki perilaku siswa, terutama bagi mereka yang dianggap sulit ditangani dengan pendekatan pembinaan konvensional. Selain itu, dukungan juga muncul karena kebijakan ini dianggap mampu menghadapi fenomena degradasi karakter di kalangan remaja. Pengguna yang mendukung cenderung mengaitkan kebijakan ini dengan urgensi membangun generasi yang disiplin, tangguh, dan beretika, terutama di tengah meningkatnya isu kenakalan remaja.

Sementara itu, sentimen netral (14,8% atau 1.210 komentar) menunjukkan bahwa sebagian pengguna memilih untuk tidak mengambil posisi tertentu. Komentar netral biasanya berupa pertanyaan, klarifikasi, atau sekadar mengulang informasi dari unggahan tanpa menunjukkan sikap emosional. Banyak pengguna dalam kategori ini menanyakan mekanisme pelaksanaan program, sasaran peserta, durasi pembinaan, hingga apakah siswa akan mendapat pendampingan psikologis. Komentar netral juga mencakup kutipan berita, ringkasan isi surat edaran, atau pernyataan yang bersifat informatif. Kehadiran sentimen netral ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum memiliki pandangan tegas, tetapi berusaha memahami kebijakan sebelum memberikan penilaian.

Jika dilihat secara keseluruhan, distribusi sentimen ini memperlihatkan bahwa kebijakan Pendidikan Barak Militer menjadi isu yang memicu diskusi publik secara intens di ruang digital. Sentimen negatif yang lebih tinggi daripada positif menunjukkan adanya resistensi

masyarakat yang cukup kuat, terutama terkait aspek humanis dalam pendidikan. Namun demikian, tingginya sentimen positif menunjukkan bahwa kebijakan tetap dipandang sebagai upaya pembinaan yang relevan oleh banyak pihak, terutama bagi kelompok yang percaya bahwa pendekatan tegas diperlukan untuk menangani fenomena kenakalan remaja. Kondisi ini mencerminkan adanya ketegangan antara paradigma pendidikan modern yang berorientasi pada pengembangan psikologis dan pendekatan kedisiplinan yang bersifat top-down.

Temuan ini penting karena dapat menjadi indikator penerimaan publik terhadap kebijakan. Dalam konteks analisis kebijakan publik, tingginya keberatan masyarakat terhadap implementasi program ini dapat menjadi pertimbangan serius bagi pemerintah daerah dalam mengevaluasi desain kebijakan, mekanisme pembinaan, serta strategi komunikasi publik. Dengan demikian, hasil analisis sentimen ini tidak hanya menggambarkan sikap masyarakat, tetapi juga memberikan gambaran mengenai sejauh mana kebijakan ini diterima dan direspons oleh publik dalam konteks era digital yang sangat partisipatif.

2. Policy Acceptance dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Barak Militer dan Respons Publik di Jawa Barat

Secara konseptual, *policy acceptance* merujuk pada sejauh mana masyarakat menerima, mendukung, atau setidaknya tidak menolak suatu kebijakan publik, yang ditentukan oleh kesesuaian kebijakan dengan nilai dan kepercayaan masyarakat, tingkat kepercayaan terhadap pemerintah (trust), serta kesadaran publik atas urgensi masalah yang ingin diselesaikan oleh kebijakan tersebut (problem awareness). Kebijakan yang gagal memenuhi dimensi-dimensi ini cenderung menghadapi resistensi, meskipun secara desain program tampak rasional dan bertujuan baik. Dalam konteks Pendidikan Barak Militer, hasil analisis sentimen di atas dapat dibaca sebagai representasi tingkat penerimaan publik tersebut: dominasi sentimen negatif (44,6%) mengindikasikan rendahnya akseptasi atau resistensi yang signifikan, sentimen positif (40,6%) mencerminkan penerimaan bersyarat dari kelompok yang menilai kebijakan ini sejalan

dengan nilai disiplin yang mereka yakini, sementara sentimen netral (14,8%) menggambarkan posisi publik yang belum menentukan sikap (*wait-and-see acceptance*) dan masih mencari informasi lebih lanjut sebelum memberikan penilaian.

Implementasi kebijakan Pendidikan Barak Militer di Jawa Barat memperlihatkan dinamika yang kompleks antara tujuan kebijakan, proses pelaksanaannya, serta respons masyarakat yang muncul dari ruang digital. Dalam perspektif teori kebijakan publik yang dikemukakan oleh Dunn (2017), implementasi merupakan fase kritis yang menentukan apakah kebijakan mampu menyelesaikan masalah publik sesuai tujuan awalnya. Kebijakan yang efektif bukan hanya yang memiliki desain program yang baik, tetapi juga yang dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat (Affrian, 2025). Karena itu, kebijakan Pendidikan Barak Militer tidak cukup dinilai dari keberhasilannya menanamkan kedisiplinan, tetapi juga dari bagaimana publik menilai kesesuaian pendekatan militeristik dengan prinsip pendidikan modern.

Program Pendidikan Barak Militer awalnya dirancang sebagai respons atas meningkatnya kasus kenakalan remaja di Jawa Barat (Kadir, 2025). Berdasarkan laporan Polda Jabar, kasus geng motor dan tawuran pelajar meningkat setiap tahun, terutama di wilayah Bandung Raya, Cirebon, dan Bogor. Fenomena ini diperparah oleh kecanduan gawai, *cyberbullying*, dan kekerasan yang direkam lalu disebar di media sosial (Polda Jabar, 2025). Pemerintah Provinsi Jawa Barat kemudian menggelontorkan Rp 6 miliar dari APBD 2025 untuk membiayai program barak militer yang menargetkan 900 siswa yang dianggap membutuhkan pembinaan kedisiplinan (Panuntun & Krisiandi., 2025).

Pelaksanaan program dilakukan di sejumlah fasilitas militer seperti Rindam III/Siliwangi dan Resimen Artileri di Purwakarta. Modul pelatihan berfokus pada baris-berbaris, kedisiplinan dasar, teamwork, penguatan mental, manajemen diri, dan pola hidup teratur. Menurut pengawasan yang dilakukan oleh KPAI, belum terdapat SOP baku yang dipublikasikan secara luas yang mengatur durasi pembinaan, asesmen psikologis peserta,

indikator keberhasilan, dan mekanisme evaluasi pasca-pembinaan (Saubani, 2025).

Ketiadaan standar ini membuat implementasi berjalan tidak seragam antar sekolah. Bahkan, terdapat temuan bahwa beberapa sekolah mengirim siswa hanya berdasarkan penilaian guru BK, tanpa asesmen psikolog profesional, sehingga menimbulkan persoalan etik dan keadilan. Dalam laporan Komnas HAM dan KPAI, ditemukan bahwa sejumlah siswa mengaku tidak mengetahui alasan mereka dikirim ke barak, yang menandakan bahwa proses komunikasi kebijakan di tingkat sekolah tidak berjalan transparan (Akbar, 2025; Mashabi & Prastiwi, 2025). Temuan lain menunjukkan bahwa sejumlah guru BK menggunakan ancaman akan dikirim ke barak sebagai bentuk kontrol kedisiplinan. Praktik seperti ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip etika pendidikan, tetapi juga membuka ruang bagi intimidasi terhadap siswa (Indriawati, 2025).

Di sisi kelembagaan, Imparsial menilai bahwa keterlibatan TNI dalam pendidikan sipil merupakan langkah yang problematis karena tidak relevan dengan tugas pokok TNI sebagaimana tertuang dalam UU 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang menegaskan bahwa fungsi utama TNI adalah menjaga pertahanan negara, bukan menjalankan fungsi pendidikan bagi warga sipil. Kritik ini muncul karena penggunaan fasilitas militer seperti Rindam III/Siliwangi atau Resimen Artileri sebagai tempat pembinaan siswa dinilai berpotensi mengaburkan batas antara fungsi pertahanan dan fungsi pendidikan publik. Lebih jauh, penggunaan instruktur militer untuk mendisiplinkan remaja juga memunculkan kekhawatiran mengenai akuntabilitas hukum dan prosedural, sebab mekanisme pengawasan dalam institusi militer berbeda dengan institusi pendidikan formal, sehingga risiko terjadinya tindakan yang melampaui batas kedisiplinan sulit dipantau secara transparan. Kekhawatiran Imparsial ini menjadi penting, mengingat lembaga pendidikan idealnya berada dalam kerangka sipil yang menjunjung prinsip humanis, bukan pendekatan koersif yang identik dengan dunia militer (Purnamasari, 2025).

Komnas HAM menambahkan bahwa program ini juga berpotensi melanggar prinsip *best interest of the child*, yaitu prinsip utama dalam perlindungan anak yang mengharuskan setiap kebijakan mempertimbangkan dampak terbaik bagi keselamatan, kesehatan mental, dan perkembangan psikososial anak. Pemindahan siswa bermasalah ke lingkungan militer tanpa asesmen profesional yang memadai dianggap berisiko menempatkan remaja dalam situasi bertekanan tinggi yang tidak sesuai dengan tahapan perkembangan psikologis mereka (Anwari dkk., 2025). Komnas HAM menyoroti bahwa sebagian siswa bahkan tidak diberi penjelasan cukup mengenai alasan pengiriman mereka, sehingga menimbulkan rasa takut, kebingungan, dan stigma sebagai “anak nakal,” yang justru dapat berdampak negatif terhadap identitas diri dan motivasi belajar. Selain itu, lingkungan barak yang cenderung tertutup menimbulkan kekhawatiran mengenai minimnya mekanisme pengaduan, terutama jika siswa mengalami tindakan yang merendahkan martabat atau intimidasi selama proses pembinaan (Anshory, 2025).

Pandangan kritis juga datang dari kalangan psikolog pendidikan yang menekankan bahwa pendekatan militer bukanlah metode yang sesuai untuk menangani perilaku remaja secara jangka panjang. Para psikolog menilai bahwa perubahan perilaku yang efektif justru memerlukan intervensi yang berbasis konseling, terapi perilaku, *positive behavior support*, serta peer mentoring yang terbukti lebih sesuai dengan prinsip perkembangan remaja. Dalam perspektif psikologi perkembangan, remaja membutuhkan ruang aman untuk membangun identitas diri, kemampuan refleksi, dan keterampilan sosial (Nasir dkk., 2025), sesuatu yang sulit dicapai jika lingkungan pembinaan menekankan kepatuhan absolut dan hukuman disipliner. Selain itu, tekanan fisik dan mental dalam pelatihan militer berpotensi memicu stres, kecemasan, atau bahkan trauma (Yasmine & Kurniawan, 2021), terutama bagi remaja yang sebelumnya sudah memiliki masalah keluarga atau kondisi emosional yang rapuh. Psikolog menegaskan bahwa jika tujuan kebijakan adalah membentuk karakter dan disiplin, maka pendekatan berbasis pendidikan karakter humanis jauh lebih efektif daripada metode penegakan disiplin yang bersifat koersif (Muafi &

Rofiq, 2026).

Dalam teori opini publik yang dijelaskan oleh McCombs (2014) media sosial berfungsi sebagai arena pembentukan agenda isu (*agenda-setting*), di mana topik yang paling sering dibahas akan menjadi perhatian utama publik. Dalam konteks implementasi Pendidikan Barak Militer di Jawa Barat, dominasi kritik di Instagram mulai dari keluhan mengenai ketidaksiapan sekolah, risiko psikologis, hingga persoalan hak anak membentuk opini dominan yang cenderung negatif terhadap kebijakan tersebut. Ketika narasi kritik lebih kuat daripada narasi dukungan, maka persepsi publik pun secara alami mengikuti arus wacana mayoritas yang beredar di ruang digital.

Dalam perspektif analisis sentimen (Liu, 2012), pola komentar publik di media sosial tidak hanya menjadi ekspresi spontan, tetapi juga berfungsi sebagai bentuk evaluasi kebijakan berbasis data empiris. Tingginya jumlah komentar negatif mencerminkan bahwa masyarakat khususnya orang tua, guru, dan remaja menilai implementasi kebijakan ini belum memenuhi aspek keselamatan, transparansi, dan perlindungan anak. Dengan demikian, komentar-komentar tersebut dapat dipahami sebagai indikator resistensi publik terhadap pelaksanaan program, bukan sekadar reaksi emosional.

Teori komunikasi digital Castells (2011) memperkuat pemahaman ini dengan menegaskan bahwa media sosial merupakan ruang publik baru yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi aktif dalam menilai dan mengkritik kebijakan pemerintah. Dalam konteks implementasi barak militer, masyarakat tidak hanya mengomentari pelaksanaannya, tetapi juga membangun narasi kolektif yang menempatkan isu ini sebagai persoalan hak anak, pendidikan humanis, dan akuntabilitas negara. Partisipasi digital ini membuat proses implementasi kebijakan tidak lagi dapat dilihat sebagai proses birokratis semata, tetapi sebagai proses sosial yang diawasi secara langsung oleh publik.

Jika dianalisis melalui kerangka kebijakan publik Dunn (2017), kondisi implementasi program barak militer di Jawa Barat menunjukkan adanya implementation gap, yaitu kesenjangan antara tujuan kebijakan membentuk karakter dan disiplin dengan praktik lapangan yang menghadapi kendala asesmen psikologis, prosedur seleksi, hingga kurangnya SOP baku. Ketika kesenjangan ini kemudian disorot secara luas di media sosial, maka ruang digital memperbesar aspek-aspek problematik tersebut sehingga membentuk persepsi negatif publik.

Oleh karena itu, resistensi publik yang muncul bukanlah reaksi tanpa dasar, melainkan hasil interaksi antara kesenjangan implementasi di lapangan, kritik lembaga resmi, dan penguatan narasi di ruang digital. Dalam hal ini, Teori Agenda-Setting McCombs (2014) menjelaskan bagaimana isu yang dominan di media sosial menjadi fokus perhatian publik; Teori Analisis Sentimen (Liu, 2012) memandang opini digital sebagai bentuk evaluasi kebijakan yang dapat diukur secara empiris; Teori Komunikasi Digital Castells (2011) menunjukkan bahwa media sosial menjadi ruang publik baru yang memungkinkan masyarakat mengkritik dan membentuk narasi kolektif; dan Teori Kebijakan Publik Dunn (2017) menegaskan bahwa kegagalan kebijakan sering muncul karena implementation gap antara tujuan dengan praktik lapangan. Keempat teori ini secara bersama-sama memperlihatkan bahwa keberhasilan sebuah kebijakan pada era digital tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakannya, tetapi juga oleh bagaimana kebijakan tersebut dipersepsikan, diperdebatkan, dan diterima oleh masyarakat.

Jika dikerangkakan dalam konsep *policy acceptance*, keempat teori tersebut sebenarnya merepresentasikan dimensi-dimensi yang menentukan tingkat penerimaan kebijakan oleh publik. Teori Kebijakan Publik Dunn (2017) menyoroti dimensi kesesuaian antara desain dan praktik implementasi (problem awareness terhadap implementation gap); Teori Analisis Sentimen Liu (2012) menjadi instrumen pengukuran empiris terhadap arah penerimaan tersebut (positif, negatif, netral); Teori Agenda-Setting McCombs (2014) menjelaskan bagaimana isu yang dominan

membentuk persepsi kolektif yang pada akhirnya memengaruhi tingkat dukungan atau resistensi; sementara Teori Komunikasi Castells (2011) menggambarkan ruang di mana proses negosiasi penerimaan tersebut berlangsung secara terbuka dan partisipatif. Dengan kata lain, rendahnya tingkat akseptasi yang tercermin dari dominasi sentimen negatif bukan semata persoalan persepsi sesaat, melainkan akumulasi dari kesenjangan implementasi, lemahnya komunikasi kebijakan, dan ketidaksesuaian pendekatan dengan nilai-nilai yang dipegang sebagian masyarakat terkait hak dan perlindungan anak. Implikasinya, peningkatan *policy acceptance* terhadap kebijakan Pendidikan Barak Militer tidak dapat dicapai hanya dengan memperbaiki narasi komunikasi publik, tetapi juga memerlukan perbaikan substantif pada aspek transparansi seleksi, standar operasional, dan jaminan perlindungan psikologis siswa sebagai prasyarat legitimasi kebijakan di mata masyarakat.

Pendidikan di barak militer memberikan sejumlah dampak positif bagi siswa bermasalah, terutama dalam membentuk kedisiplinan dan tanggung jawab melalui rutinitas ketat seperti apel pagi dan jadwal teratur (Kadir, 2025), serta meningkatkan ketahanan mental lewat pelatihan fisik yang menantang. Selain itu, program ini juga menjauhkan siswa sementara dari lingkungan negatif seperti narkoba, geng, atau kekerasan rumah tangga, sembari memberi pengaruh positif dari instruktur dan sesama peserta (Mahbubi, 2025).

Dengan demikian, kebijakan Pendidikan Barak Militer perlu dievaluasi secara menyeluruh dengan mempertimbangkan standar seleksi yang lebih profesional, berbasis asesmen psikologis yang objektif, serta didukung mekanisme pendampingan individu bagi setiap peserta. Proses seleksi yang transparan sangat penting untuk mencegah stigmatisasi siswa sebagai “anak bermasalah” dan memastikan bahwa peserta yang dikirim benar-benar membutuhkan intervensi khusus. Selain itu, keterlibatan psikolog, konselor sekolah, dan ahli perkembangan remaja perlu diperkuat agar proses pembinaan tidak hanya menekankan kedisiplinan fisik, tetapi juga memperhatikan kesehatan mental dan kebutuhan emosional siswa.

Pemerintah daerah juga harus meningkatkan kualitas komunikasi publik agar kebijakan tidak menimbulkan resistensi, khususnya di ruang digital yang sangat sensitif terhadap isu hak anak dan pendekatan pendidikan. Pemaparan tujuan, prosedur, SOP, serta perlindungan keamanan siswa perlu disampaikan secara terbuka melalui kanal resmi agar masyarakat tidak membangun persepsi negatif berdasarkan informasi yang tidak lengkap. Di sisi implementasi, metode pembinaan perlu diarahkan menuju pendekatan yang lebih humanis dan sesuai dengan prinsip pendidikan nasional yang mengutamakan perlindungan anak, pengembangan karakter, dan pemberdayaan remaja. Dengan mengintegrasikan disiplin, konseling, serta pembinaan berbasis nilai dan dukungan psikososial, kebijakan ini dapat berjalan lebih efektif sekaligus mendapatkan legitimasi dari masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh sebanyak 8.169 komentar dari Instagram yang dianalisis untuk melihat respons publik terhadap kebijakan Pendidikan Barak Militer di Jawa Barat. Dari jumlah tersebut, sentimen negatif mendominasi dengan 3.639 komentar, diikuti sentimen positif sebanyak 3.320 komentar, dan sentimen netral sebanyak 1.210 komentar. Dominasi sentimen negatif menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat menilai kebijakan ini masih menimbulkan kekhawatiran, terutama terkait aspek psikologis siswa, proses seleksi yang belum transparan, potensi stigma, serta kurangnya standar operasional yang jelas dalam pelaksanaan program. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa pembahasan publik di media sosial terutama berfokus pada isu perlindungan anak, kesiapan sekolah, dan relevansi pendekatan militer dalam pendidikan. Meskipun demikian, dukungan tetap muncul dari sebagian masyarakat yang menganggap program ini sebagai upaya pembinaan dan peningkatan kedisiplinan bagi siswa yang dinilai memerlukan intervensi. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan Pendidikan Barak Militer masih membutuhkan evaluasi yang lebih mendalam, baik dari sisi mekanisme

pelaksanaan maupun pendekatan pembinaannya. Pemerintah daerah perlu memperhatikan transparansi seleksi, pendampingan psikologis, penyusunan SOP yang baku, serta penyampaian komunikasi publik yang lebih jelas agar kebijakan dapat diterima dengan lebih baik oleh masyarakat dan sejalan dengan prinsip pendidikan yang aman, inklusif, dan berorientasi pada perkembangan siswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Affrian, R. (2025). Partisipasi Masyarakat Sebagai Penentu Efektivitas Kebijakan Kebersihan Pasar Di Amuntai Tengah. *Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, 9(1), 109–126.
- Akbar, N. A. (2025). KPAI: Siswa Dikirim ke Barak Hanya Berdasarkan Rekomendasi Guru BK. *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2025/05/16/14241621/kpai-siswa-dikirim-ke-barak-hanya-berdasarkan-rekomendasi-guru-bk>
- Anshory, W. W. (2025). Siswa Bermasalah Dikirim ke Barak Militer, Komnas HAM Tak Sepakat dengan Menteri Piga. *kompas.com*. <https://www.kompas.com/jawa-barat/read/2025/05/07/061818388/siswa-bermasalah-dikirim-ke-barak-militer-komnas-ham-tak-sepakat>
- Anwari, A. C. A., Fahruzy, K., Putra, R. I. K., & Yohanes, Y. (2025). EFEKTIVITAS PROGRAM BARAK MILITER SOLUSI UNTUK MENGATASI SISWA/REMAJA BERMASALAH DI PROVINSI JAWA BARAT. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(02), 337–351.
- Castells, M. (2011). *The rise of the network society*. John wiley & sons.
- Creswell W, J. (2018). *Reasearch Design,Qualitative, uantitative, Mixed Methods Approaches* (V). SAGE Publication. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/15424065.2022.2046231>
- Dunn, W. N. (2017). *Public policy analysis: An integrated approach*. Routledge.
- Fazrina, I. N., Safitri, D., & Sujarwo, S. (2025). Persepsi Generasi Z terhadap Efektivitas Aktivisme Digital sebagai Bentuk Partisipasi Sosial. *RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 3 (3), 53–62.
- Indriawati, T. (2025). KPAI Ungkap Ada Guru BK Ancam Siswa yang Tidak Mau Dikirim Barak Militer. *kompas.com*. <https://www.kompas.com/jawa-barat/read/2025/05/17/143844088/kpai-ungkap-ada-guru-bk-ancam-siswa-yang-tidak-mau-dikirim-barak>
- Kadir, A. (2025). Pendidikan Karakter Semi Militer dalam Program Barak Militer Dedi Mulyadi: Integrasi Nilai Religius, Budaya Lokal, dan Disiplin. *Jurnal Alasma: Media Informasi dan Komunikasi Ilmiah*, 7(2), 127–139.
- Kartodinoto, S. R. A., Purnomo, D., & Utomo, A. W. (2024). Analisis Instagram Sebagai Ruang Publik Terhadap Respon Generasi-Z Dalam Kontestasi Pilpres 2024 (Studi Pada Generasi-Z Di Kota Salatiga). *Jurnal Niara*, 17(1), 20–29.
- Liu, B. (2012). *Sentiment analysis and opinion mining*. Springer Nature. <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-02145-9>
- Mahbubi, M. (2025). Pendidikan Karakter Melalui Pendekatan Militer: Analisis Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dalam Mengatasi Siswa Bermasalah. *Jurnal Man-Anaa*, 2(1), 54–66.
- Mashabi, S., & Prastiwi, M. (2025). KPAI: Kirim Siswa Nakal ke Barak Militer

- Berpotensi Langgar Hak Anak. *kompas.com*.
<https://www.kompas.com/edu/read/2025/05/17/130716571/kpai-kirim-siswa-nakal-ke-barak-militer-berpotensi-langgar-hak-anak>
- McCombs, M. (2014). *Setting the Agenda*. Cambridge 2nd ed (ed.). Malden, MA. Polity Press.
- Muafi, A., & Rofiq, M. (2026). PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM RAMAH ANAK BERBASIS POSITIVE DISCIPLINE DALAM PENCEGAHAN PERUNDUNGAN DI PONDOK PESANTREN. *An-Nahdlah: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(3), 1192–1205.
- Nasir, A. A., Nurina, P., & Hsb, F. H. K. (2025). Peran Konselor Sebaya dalam PIK-R (Pusat Informasi Konseling dan Remaja) Terhadap Keterampilan Sosial Remaja. *Al-Isyraq: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, dan Konseling Islam*, 8(2), 953–970.
- Panuntun, B. P., & Krisiandi. (2025). Pemprov Jabar Gelontorkan Rp 6 Miliar untuk Program Siswa Masuk Barak Militer. *kompas.com*.
<https://bandung.kompas.com/read/2025/05/05/143204978/pemprov-jabar-gelontorkan-rp-6-miliar-untuk-program-siswa-masuk-barak>
- Parhi, N. Z. (2025). Analisis Gagasan Kang Dedi Mulyadi tentang Pendidikan Karakter Remaja melalui Model Barak Militer. *Muadalah*, 13(1), 1–16.
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (2025). *Surat Edaran Nomor 45/PK.03.03/KESRA tentang 9 Langkah Pembangunan Pendidikan Jawa Barat Menuju Terwujudnya Gapura Panca Waluya*.
- Polda Jabar. (2025). Polres Purwakarta Berhasil Menciduk 12 pemuda, diduga geng motor yang terlibat tawuran. *Tribatanews.Jabar.Polri.Go.Id*.
<https://tribatanews.jabar.polri.go.id/polres-purwakarta-berhasil-menciduk-12-pemuda-diduga-geng-motor-yang-terlibat-tawuran/>
- Prasetyo, E., Irawan, Y. F., & Supriyanto, A. (2024). FACTOR ANALYSIS OF E-GOV ACCEPTANCE IN SOCIETY AND GOVERNMENT. *SOSCIED*, 7(1), 43–49.
- Prayoga, R. (2025). Siswa bermasalah Jabar akan dididik di barak militer mulai 2 Mei 2025. *Antaranews.com*.
<https://www.antaranews.com/berita/4797733/siswa-bermasalah-jabar-akan-dididik-di-barak-militer-mulai-2-mei-2025>
- Purnamasari, D. D. (2025). Imparsial: Program Pendidikan Barak Militer Tidak Relevan dengan Tugas Pokok TNI. *kompas.com*.
<https://www.kompas.id/artikel/imparsial-program-pendidikan-barak-militer-tidak-relevan-dengan-tugas-pokok-tni>
- Putra, L. D. (2024). *Analisa Konten Media Sosial Instagram@ folkative dalam Membentuk Opini Publik*. KODEUNIVERSITASo41060# UniversitasBuddhiDharma.
- Rahmat, M., & Cangara, H. (2024). Analysis Of Citizen Acceptance In Police Services: A Perspective From The Acceptance Theory. *Jurnal Badati*, 6(1), 213–225.
- Rosnawati, A., & Satyadharma, M. (2025). Tawuran pelajar dan pertimbangan konsep siswa masuk barak militer. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 875–884.
- Saubani, A. (2025). KPAI Soroti Belum Adanya SOP Program Pendidikan Anak di Barak Militer Jabar. *News.Republika.Co.Id*.
<https://news.republika.co.id/berita/swckgq409/kpai-soroti-belum-adanya-sop-program-pendidikan-anak-di-barak-militer-jabar>
- Setyawan, E., Zaini, A., Mubarodin, W., Aulia, A., Reza, M. I., & Ibrahim, M. (2025). Kontestasi Framing Media Online Indonesia Model Robert M. Entman Terhadap Program Barak Militer Dedi Mulyadi. *Nusantara Hasana Journal*, 5(4), 59–75.
- Syafei, F. R., & Assifa, F. (2025). Selain di Purwakarta, Siswa Bermasalah di Kota Bandung Masuk Barak Militer. *kompas.com*.

- <https://bandung.kompas.com/read/2025/05/02/152042478/selain-di-purwakarta-siswa-bermasalah-di-kota-bandung-masuk-barak-militer>
Widjaja, Y. G. N., & Prastiwi, M. (2025). Siswa Nakal di Jawa Barat Akan Dididik di Barak Militer Mulai 2 Mei. *kompas.com*.
<https://www.kompas.com/edu/read/2025/04/28/113141771/siswa-nakal-di-jawa-barat-akan-dididik-di-barak-militer-mulai-2-mei>
- Yasmine, A. N., & Kurniawan, A. (2021). Gambaran Anger Issues, Coping Stress, dan Risiko PTSD pada Taruna Marinir AAL Selama Dikko. *Buletin Penelitian Psikologi dan Kesehatan Mental (BRPKM)*, 1(1), 985–1002.
- Yunizar, H. V., & Karina, S. (2024). Membangun Karakter Bangsa: Peran Pendidikan dalam Membentuk Generasi Unggul. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Pendidikan* | E-ISSN: 3062-7788, 1(3), 18–20.